



Membangun Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Di Jakarta Selatan

Firyal Nur Fadhilah¹, Haifa Marsya Luthfia²,
Mahesha Suryo Megantara³, Aniqotul Ummah⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

		Abstrak
Received:	20 Mei 2025	Penelitian ini melihat apa saja yang memengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 di Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana akses ke informasi, keterlibatan masyarakat, dan juga pendidikan politik berkontribusi pada peningkatan kesadaran pemilih pemula. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini menemukan bahwa pemilih pemula memiliki potensi yang besar dalam memengaruhi hasil pemilu tetapi mereka menghadapi berbagai masalah, seperti tidak mengetahui banyak mengenai proses pemilu dan minimnya kampanye yang ditunjukkan kepada mereka. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi sosialisasi pemilu yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemilih pemula dalam proses demokrasi.
Revised:	27 Mei 2025	
Accepted:	01 Juni 2025	
Kata Kunci:		Partisipasi Pemilih Pemula, Pendidikan Politik, Pemilu 2024, Jakarta Selatan, Media Sosial.

(*) Corresponding Author:

2310413180@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413166@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310414188@mahasiswa.upnvj.ac.id³, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁴

How to Cite: Fadhilah, F., Luthfia, H., Megantara, M., & Ummah, A. (2025). Membangun Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Di Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 109-120. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10730>.

PENDAHULUAN

Jumlah pemilih merupakan komponen penting dari demokrasi perwakilan di negara demokrasi. Landasan demokrasi perwakilan elektoral adalah partisipasi politik. Pemungutan suara dan pemilu adalah dua cara ekspresi demokrasi. Pendekatan empiris dan normatif dapat digunakan untuk memahami demokrasi dalam situasi ini. Pendekatan normatif demokrasi menekankan pada prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Sementara itu, pendekatan demokrasi empiris menekankan pada bagaimana demokrasi diwujudkan dalam kehidupan politik sebagai serangkaian proses yang mengatur kemampuan rakyat dalam memilih, menunjuk, dan meminta pertanggungjawaban wakil-wakil dalam lembaga-lembaga perwakilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara demokrasi tidak dapat eksis tanpa memberikan kesempatan diselenggarakannya pemilu yang sistematis dan berkala. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu proses politik yang berlangsung setiap lima tahun sekali dan merupakan tonggak penting yang mewakili kedaulatan rakyat (Aida Fitriana Awaliah, dkk: 2023).

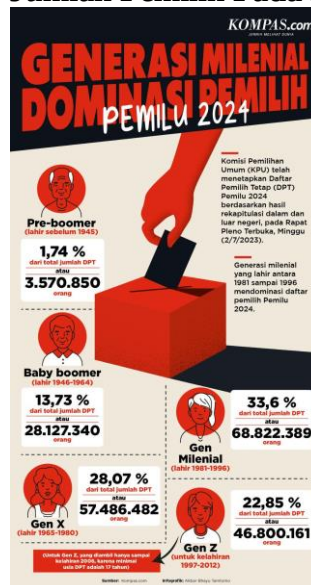
Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu cara mewujudkan negara demokrasi (Pemilu). Banyak negara telah menggunakan pemilu sebagai alat demokratisasi, termasuk Indonesia, yang memiliki populasi beragam. Pemilu serentak pada tahun 2024 diharapkan lebih unggul dibandingkan tahun 2019. Meningkatnya partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan konsolidasi demokrasi menjadi sumber optimisme yang signifikan.

Salah satu cara masyarakat mengekspresikan partisipasi politik dan kedaulatannya adalah melalui pemilihan umum. Dengan memberikan suara langsung dalam pemilihan umum, para pemilih merupakan kekuatan paling kuat yang membentuk politik lokal. Meskipun mereka memainkan berbagai peran dalam pemilu, pemilih baru selalu diasumsikan belum pernah memberikan suara pada pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik pemilih pemula, yang terlihat dari ketidakmampuan mereka dalam memberikan suara (Chairan Zibar L Parisu Beniman, dkk: 2022).

Semua warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan umum agar dapat dilaksanakan. Keterlibatan dalam politik sangatlah penting karena setiap suara dipandang mempunyai kekuatan untuk membentuk nasib suatu bangsa dan mewujudkan semangat konstitusi, yang memberikan kedaulatan rakyat atas pemerintahan daerahnya untuk mencapai demokrasi lokal yang kuat. Memberikan suara pada surat suara pada saat pemilu, menyaksikan proses pemilu sebagai pengamat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemilu, dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu merupakan contoh partisipasi politik. Bagi pemilih pemula, kemampuan berpartisipasi dalam politik difasilitasi oleh berbagai lembaga perantara di lingkungannya, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya (Beniman, dkk: 2022).

Pemilih pemula menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan mereka kehilangan minat terhadap proses demokrasi, khususnya pada pemilu 2024. Hal ini menjadi kendala yang cukup besar, terutama di mata generasi milenial yang kurang tertarik pada politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan berbagai taktik untuk menarik minat generasi muda dan mendorong mereka untuk terus peduli dan berpartisipasi aktif dalam sistem demokrasi yang mencakup pemilihan umum rutin.

Gambar 1. Jumlah Pemilih Pada Pemilu 2024



Sumber: Kompas.Com

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah pemilih paling banyak pada pemilihan umum tahun 2024 yaitu dari generasi milenial dengan kelahiran antara tahun 1981-1996 dengan jumlah DPT 68.822.389 jiwa. Sedangkan, untuk daftar pemilih tetap generasi Z sendiri yang mana di dalamnya sudah termasuk pemilih pemula mencapai 22,85% dari keseluruhan jumlah DPT di Indonesia. Dengan demikian, tidak bisa juga dipungkiri bahwa

pemilih pemula juga bisa dikatakan banyak dan harus diberikan pendidikan politik agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat pentingnya generasi muda dalam membentuk demokrasi dan kebijakan publik Indonesia, maka latar belakang penelitian ini berpusat pada partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 di Jakarta Selatan. Pemilih pemula, yang didefinisikan sebagai mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, memiliki peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu, namun mereka sering menghadapi sejumlah kendala, termasuk ketidakpedulian politik, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pemahaman tentang pemilu. proses pemilu. Tempat yang menarik untuk mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula adalah Jakarta Selatan, wilayah metropolitan dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Diharapkan dengan memahami dinamika ini, akan ditemukan metode praktis untuk meningkatkannya partisipasi mereka dalam memberika hak suaranya (Taufiqurrohmah Syahuri, Syamsul Hadi, 2023).

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024?

Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini ialah:

1. Faktor sosial apa yang mempengaruhi keputusan pemilih muda untuk memberikan suara pada pemilu 2024?
2. Apa pengaruh media sosial terhadap perilaku memilih generasi muda pada pemilu 2024?
3. Seberapa besar pengaruh pendidikan politik terhadap peningkatan jumlah pemilih muda di Jakarta Selatan?
4. Kendala apa saja yang dihadapi generasi muda yang ingin memilih pada pemilu 2024?

KAJIAN LITERATUR

Literatur Review

Dalam penelitian ini artikel jurnal berjudul Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Implementasi Demokrasi pada Pemilu 2024 yang ditulis oleh TB Misa Djafar dan Heru Dian Setiawan pada tahun 2023 dijadikan sebagai penelitian terdahulu (Setiawan, dkk: 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih muda pada pemilu 2024 dengan fokus pada konteks perilaku pemilih. Keterlibatan pemilih muda dalam pemilu masih dapat dilihat sebagai ukuran kesadaran politik atau tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem politik atau pemerintahan saat ini, menurut temuan studi tersebut. Pemilih muda saat ini juga lebih logis dan skeptis terhadap calon pemimpin Indonesia di masa depan. Kapasitas pemilih muda untuk beradaptasi terhadap modernitas memerlukan pemimpin yang mampu menyesuaikan dengan generasi muda (TB. Massa Djafar Heru Dian Setiawan: 2023).

Konsep

Demokrasi

Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM) adalah negara pertama yang menerapkan gagasan ini. Di kemudian hari, istilah "demokrasi" berkembang dan mengalami pergeseran modernisasi selama kebangkitan Renaisans. Ide-ide penting mengenai hubungan antara rakyat dan penguasa atau negara muncul pada masa ini. Nilai-nilai berikut ini dicantumkan oleh Henry B. Mayo sebagai persyaratan demokrasi. Berikut adalah cara untuk mengidentifikasi nilai-nilai tersebut: menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan sukarela. Memastikan transisi tanpa kekerasan dalam masyarakat yang dinamis. Penggantian penguasa secara berkala. Cobalah untuk menggunakan kekuatan sesedikit mungkin.

Menghormati dan mengakui pentingnya keberagaman dan pertahankan hukum (Sunarso: 2010).

Salah satu negara yang bergabung dalam penerapan demokrasi adalah Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, di tengah krisis ekonomi Asia, rezim Jenderal Suharto yang tangguh tiba-tiba berakhir setelah 32 tahun berkuasa. Namun, masih belum jelas apakah kekuatan demokrasi akan menang dalam situasi politik di Indonesia. Masih sulit untuk membayangkan bahwa rezim militer baru yang sekuat rezim sebelumnya akan muncul kembali. Menyusul terungkapnya catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia oleh militer, militer mengalami masalah harga diri yang parah dan melemah secara signifikan. Sementara itu, masyarakat sipil semakin kohesif dan terorganisir dalam menentang kembalinya militer ke kekuasaan (Sunarso: 2010).

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum adalah prosedur yang digunakan untuk memilih calon untuk mengisi posisi terpilih di pemerintahan. Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum ini adalah untuk mewujudkan negara demokratis yang calonnya dipilih oleh mayoritas pemilih. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana penegakan kedaulatan rakyat. Dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Badan penyelenggara pemilu dibentuk di ibu kota, di setiap daerah pemilihan, dan di setiap daerah pemilihan untuk mengawasi pemilu. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan komite ini, yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan bantuan partai politik; Namun KPU atau partai mempunyai kewenangan yang luas. Selain berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilu juga memberikan lingkungan yang paling adil bagi partai politik untuk bersaing dalam hal seberapa baik kinerja mereka sejauh ini dan bertanggung jawab kepada para pemilih untuk memilih mereka berdasarkan pendapat umum. dapat diandalkan dan mampu memenuhi beragam tujuan masyarakat. Setiap 5 (lima) tahun sekali, masyarakat secara adil dan jujur menilai partai politik sebagai calon dalam pemilu, sehingga partai tersebut dapat menunjukkan legitimasinya melalui proses pemilu (Faqih, dkk: 2022).

Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dengan memperhatikan cara penyelenggaraan pemilu. Pernyataan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen” juga diperjelas dalam Pasal 22E ayat 5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat independen karena menjalankan prinsip bahwa mereka yang menyelenggarakan pemilu harus bebas dari pengaruh partai politik atau otoritas pemerintah. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik dan calon-calon yang mencalonkan diri di dalamnya, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil. Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Seluruh calon tersebut telah mendaftar ke KPU sebagai penyelenggara guna melindungi KPU dari potensi pengaruh peserta pemilu tersebut di atas (Muhammad Irfan Faqih Ahmad Zairudin, dkk: 2022).

Di Indonesia, pemilu mempunyai setidaknya tiga tujuan: pertama, untuk memfasilitasi transisi pemerintahan yang lancar dan tertib; kedua, menjalankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945; dan ketiga, menjunjung tinggi hak asasi warga negara. Dalam pemilu, tidak hanya wakil rakyat di parlemen yang akan dipilih, namun juga para

pemimpin yang nantinya duduk di kursi eksekutif. Dalam beberapa pemilu yang diselenggarakan selama ini, sistem pemilu di Indonesia diterapkan dengan menggunakan sistem terdaftar yang dipadukan dengan sistem keterwakilan berimbang.

Partisipasi Masyarakat

Ikut serta dalam suatu kegiatan, partisipasi atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan, dan partisipasi aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan merupakan arti harafiah dari kata partisipasi. Salah satu pengertian partisipasi adalah ketika seseorang memilih untuk mengambil bagian secara bebas dan tanpa paksaan. Partisipasi dalam masyarakat merupakan suatu proses yang dapat membantu masyarakat untuk mulai sadar terhadap keadaan dan persoalan yang dihadapinya serta berupaya mencari solusinya (kesadaran kritis). Sumardi mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam suatu proses pembangunan, yang diungkapkan melalui pernyataan atau tindakan, dengan menyumbangkan gagasan, tenaga, waktu, uang, keterampilan, atau materi, serta dengan menggunakan dan menghargai hasil pembangunan (Rizky Ayomi Pangestu Elen Pitria, dkk: 2023).

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu tanda keberhasilan suatu program, menurut Slamet. Menurutnya, keterlibatan mengacu pada keterlibatan aktif dan bermakna warga dalam berbagai bidang, termasuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, pelaksanaan program secara sukarela, dan pemanfaatan hasil program. Adi mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi permasalahan dan partisipasi masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi (Patria, dkk: 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangatlah penting karena hasil pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam perolehan suara, akan menentukan arah pemerintahan dalam lima (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh warga negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu juga menentukan sejauh mana hal tersebut.

Pemilih Muda

Keterlibatan dan semangat pemilih pemula merupakan salah satu elemen kunci yang akan berkontribusi terhadap keberhasilan pemilu. Mendorong pemilih baru untuk berpartisipasi dalam politik merupakan tantangan yang umum. Remaja yang masih sangat tidak menentu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal politik, dianggap sebagai Usia Pemilih Pemula. Remaja perlu bersikap dewasa dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal politik karena mereka masih sangat naif.

Namun tidak semua remaja mempunyai tingkat kematangan yang sama. Setiap momentum pemilu harus mengarah pada peningkatan partisipasi pemilih yang berkelanjutan, khususnya pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Partisipasi pemilih sangatlah penting dan harus diingat oleh penyelenggara, terutama bagi pemilih baru. Proses menjangkau dan mendidik pemilih pemula tidak bisa disederhanakan karena, sebagai pemula di dunia politik, sudah sewajarnya mereka tidak ikut serta dalam proses demokrasi. Hal ini disebabkan oleh usia muda dan pengalaman mereka, terutama karena kematangan mental mereka (Hasyim, dkk: 2023).

Untuk meminimalkan jumlah waktu dan upaya yang diperlukan bagi pemilih baru untuk sadar berpolitik, mereka harus dipetakan. Pemahaman pemilih pemula terhadap politik pada dasarnya didasarkan pada lingkungan sosialnya. Dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lahir di lingkungan yang jauh dari suasana politik, mereka yang lahir di lingkungan

politik atau di keluarga politisi tentu mengalami hal yang berbeda (Sharla Shafa Salsabila Azkia Abdulloh Hasyim: 2023). Pemilih baru tidak hanya menjadi fokus penyelenggara pemilu, namun pemilih sendiri juga akan membidik mereka. Meningkatkan partisipasi pemilih memerlukan pemetaan ini, yang mana hal ini sangat penting. Ada dua jenis pemilih pemula dalam kategori ini: mereka yang berusia 17 tahun pada hari pemilu dan mereka yang berusia 17 tahun pada hari sebelumnya.

Teori Partisipasi Politik

Salah satu ciri modernisasi politik adalah peningkatan partisipasi politik yang berkorelasi dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. Di negara-negara berkembang, politik dan pemerintahan hanya dipandang sebagai domain segelintir elit saja. Secara umum, kelompok masyarakat yang kurang menyadari dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan mereka adalah petani, buruh, dan pedagang kecil. Namun, mereka juga mempunyai kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan mereka (Yavelma Miaz: 2012).

Terlibat secara politik, secara harafiah berarti berpartisipasi dalam lingkungan politik. Hal ini merujuk pada partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik. Partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pengambilan kebijakan, termasuk kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan dan evaluasi. Keterlibatan politik, dalam pandangan Miriam, merupakan indikasi penggunaan kekuatan politik yang sah oleh masyarakat. Partisipasi warga masyarakat dalam pemilu didorong oleh harapan bahwa kepentingan mereka akan tersalurkan, atau paling tidak dipertimbangkan, melalui upaya kolektif. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa tindakan mereka mempunyai dampak, yang mereka sebut sebagai kemanjuran politik. Dengan demikian, semakin baik demokrasi yang diterapkan maka semakin besar pula partisipasi masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang mengikuti dan memahami isu-isu politik, serta mereka yang berpartisipasi atau ingin berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Pola memilih dalam pemilu dapat dikelompokkan kepada tiga golongan yaitu (Yalvema Miaz: 2012):

- a. Pendekatan sosiologi, pendekatan sosiologis didasarkan pada struktur strata masyarakat dan keterkaitan antara berbagai faktor sosial yang mempengaruhi perilaku memilih, seperti status sosial ekonomi, agama, ras, gender, dan pekerjaan pemilih. Untuk mengkaji tren pemilu di negara-negara Eropa, teori ini sering diterapkan. Seymour Martin Lipset, Paul F. Lazarsfeld, Bernard R. Berelson, dan Harel Gandet adalah beberapa di antara akademisi tersebut. Sikap seseorang terhadap politik dibentuk oleh proses sosialisasi politik yang dialaminya di rumah, yang berlanjut hingga dewasa. Selain itu, pengetahuan politik diperoleh di lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Selain itu, perilaku memilih dipengaruhi oleh hubungan antara kelas sosial, tempat tinggal, dan agama.
- b. Pendekatan psikologi, pendekatan psikologis, juga dikenal sebagai pendekatan Michigan, didasarkan pada elemen atau sikap psikologis, khususnya yang berdampak pada perilaku memilih seseorang. Contohnya adalah afiliasi individu dengan partai politik, sentimen mereka terhadap calon presiden atau wakil daerah yang mencalonkan diri, dan dampak isu politik yang sedang terjadi. Perkembangan mental awal seseorang sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang diperoleh dari orang tuanya. Dalam situasi ini, pemahaman seseorang terhadap persoalan politik dan terbentuknya kecenderungan politik sangat dipengaruhi oleh perilaku orang tua atau kerabatnya. Seiring bertambahnya usia,

pandangan politik mereka akan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti teman sekolah, teman kerja, tempat ibadah, dan kegiatan ekstrakurikuler.

- c. Pendekatan ekonomi politik rasional, Hubungan antara faktor untung atau rugi yang akan dialami seseorang dalam memilih partai politik menjadi landasan pendekatan ekonomi politik rasional. Pendekatan politik rasional, disebut juga pendekatan ekonomi, menghubungkan dua pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya (psikologi dan sosiologi). Pendekatan Melweit juga disebut sebagai pendekatan Consumer Model of Party Choice. Strategi ini didasarkan pada dampak terhadap status perekonomian negara, yang sangat terkait dengan tren pemilu. Oleh karena itu, para pemilih akan mengambil keputusan berdasarkan penilaian logis (aktual) mengenai manfaat dan kerugian setelah mengevaluasi iklim politik pada saat itu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, untuk memahami secara menyeluruh bagaimana komunikasi politik membentuk persepsi kandidat dalam pemilu. Pesan kampanye, interaksi media sosial, dan konten media massa semuanya dianalisis menggunakan metodologi kualitatif. Data bibliografi naskah yang diambil dari Google Scholar dan diperiksa menggunakan tinjauan pustaka atau literatur review dijadikan sebagai sumber data penelitian. Proses pengumpulan, penilaian, interpretasi, dan sintesis data dari literatur atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian atau topik penelitian tertentu dikenal sebagai tinjauan literatur (Sauda Julia Merliyana Miza Nina Adlini, dkk: 2022).

Memahami perkembangan pengetahuan yang ada di suatu bidang, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan mengembangkan landasan teoritis untuk penelitian masa depan adalah tujuan dari tinjauan literatur. Proses pengumpulan data penelitian ini melibatkan pencarian dan pembuatan sumber dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk memperkuat klaim dan gagasan tersebut, bahan pustaka yang dikumpulkan dari berbagai referensi dikaji secara kritis dan perlu ditelaah secara menyeluruh.

HASIL & PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilih Pemula Memberikan Suara pada Pemilu 2024

Surianto (2018) menegaskan bahwa sejumlah faktor, termasuk nilai-nilai sosial ekonomi, politik, pribadi, lingkungan, dan budaya, mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu. Namun Surianto (2018) mengutip perkataan Miriam Budiarjo bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam suatu pemilu, antara lain (Panji Surianto, 2018):

1. Sosial ekonomi, adalah kelas komunitas sosial atau sekelompok orang. Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan merupakan tiga komponen utama status sosial yang dapat diukur dengan menggunakan indikator kombinasi.
2. Politik, menentukan hasil partisipasi politik masyarakat. Komponen tersebut meliputi wacana politik dan pandangan politik yang berkaitan dengan kesadaran, minat, dan kepedulian individu terhadap lingkungan setempat. Terdapat proses pengambilan keputusan yang sekaligus menetapkan pola dan aturan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan politik dan pengetahuan masyarakat.
3. Fisik individu dan lingkungan, salah satu faktor yang mempunyai dampak signifikan terhadap suatu proses pemilu adalah popularitas kandidat. Dapat dipastikan separuh

masyarakat telah mengembangkan rasa percaya setelah mengetahui kepribadian dan perilaku seorang kandidat. Hal ini diikuti dengan latar belakang kandidat dan riwayat kinerjanya, yang membuatnya sangat menarik perhatian publik.

4. Nilai budaya, merupakan prinsip-prinsip dasar yang membentuk demokrasi yang pada dasarnya adalah politik yang benar secara moral atau metode dan budaya masyarakat. Pandangan politik, kekaguman, kebijaksanaan, dan watak semuanya termasuk dalam komponen ini.

Dimensi afektif yang berkaitan dengan emosi, sentimen, dan sikap pribadi dipertimbangkan dalam paradigma ini. Mengingat hal ini, penting untuk memahami bagaimana emosi mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Studi tentang perasaan, motif, kesukaan, sikap, dan nilai-nilai seseorang merupakan bagian dari paradigma ini. Paradigma ini dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana sikap dan tindakan pemilih dipengaruhi oleh perasaan seperti ketakutan, kegembiraan, atau kebencian terhadap isu politik atau tokoh politik tertentu. Pendapat pemilih terhadap partai atau kandidat politik juga dapat dipengaruhi oleh emosinya. Konflik antar partai politik secara kognitif dapat mempengaruhi seberapa baik pemilih baru mempunyai informasi mengenai isu-isu politik terkait. Secara afektif, perselisihan ini dapat menyebabkan masyarakat merasa kecewa, tidak puas, atau curiga terhadap partai politik yang bersangkutan (Nina Novita, 2019).

Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih

Ada banyak sekali platform media sosial yang tersedia saat ini, seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Line, Telegram, Twitter, dan masih banyak lagi. Seiring kemajuan teknologi informasi berbasis internet, peran dan dampak media sosial menjadi semakin signifikan sebagai faktor yang dapat memberikan dampak positif terhadap keterlibatan politik pemilih baru pada pemilu 2019. Remaja yang baru pertama kali memilih menggunakan media sosial secara luas, sehingga hal ini merupakan isu yang saling berkaitan.

Partisipasi masyarakat atau warga negara dalam pemilihan umum disebut dengan perilaku pemilih, dan merupakan keputusan politik yang diambil oleh masyarakat. Keterlibatan pemilih bukan hanya bentuk partisipasi politik yang paling mendasar, namun juga merupakan salah satu cara penyelenggaraan pemilu. Perbuatan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah disebut dengan partisipasi pemilih (Sukarman Kamuli, Sainudin Latore, 2023).

Selain itu, banyak sekali video kampanye, acara, bahkan debat politik di YouTube yang merupakan salah satu bentuk komunitas konten. Selain itu, unggahan ini mungkin memengaruhi cara pemilih pemula memilih. Orientasi kandidat, dimana kedudukan kandidat dalam pemilihan kepala daerah akan dipengaruhi oleh kesadaran pemilih terhadap keberadaan kandidat tersebut. Secara umum, pemilih lebih cenderung mendasarkan penilaian mereka terhadap kandidat berdasarkan popularitas, latar belakang, rekam jejak, visi, dan misi mereka.

Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Jumlah Pemilih Muda di Jakarta Selatan

Untuk meningkatkan jumlah pemilih muda di Jakarta Selatan, pendidikan politik sangatlah penting. Jakarta Selatan menjadi lokasi ideal untuk pendidikan politik karena merupakan wilayah metropolitan dengan kekayaan keberagaman sosial dan budaya. Pemilih muda yang mendapat pendidikan politik berkualitas akan lebih mampu memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, pentingnya memilih, dan konsekuensi dari keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin. Pemilih muda akan lebih cenderung menggunakan hak

pilihnya dan berpartisipasi dalam proses demokrasi jika mereka mempunyai informasi yang cukup (Muturizal Sah Fenta Hashfi, 2024).

Memberikan informasi yang ringkas dan mudah dipahami mengenai proses pemilu merupakan komponen penting dalam pendidikan politik. Prosedur pemungutan suara, seperti cara mendaftar, memberikan suara, dan memahami berbagai jenis surat suara, masih membingungkan banyak pemilih muda. Pemilih muda dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang proses pemilu melalui inisiatif pendidikan politik yang terorganisir seperti seminar, lokakarya, dan kampanye kesadaran. Mereka tidak akan merasa dikucilkan dari proses ini dan sebagai hasilnya mereka akan lebih nyaman mengambil bagian dalam pemilu.

Selain itu, pendidikan politik dapat membantu pemilih muda menjadi lebih sadar sosial. Permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi masalah besar di Jakarta Selatan. Pendidikan politik dapat menginspirasi pemilih muda untuk lebih peduli terhadap isu-isu ini dengan mengajarkan mereka bagaimana kebijakan publik dapat berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Pemilih muda akan lebih cenderung memilih kandidat yang memiliki tujuan yang sama ketika mereka memahami bahwa pilihan mereka dapat mempengaruhi masyarakat menjadi lebih baik. Pendidikan politik juga dapat meningkatkan keterlibatan pemilih muda di masyarakat. Pemilih muda dapat berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dan pemimpin lokal melalui acara-acara seperti debat, kampanye sosial, dan diskusi kelompok. Jaringan sosial mereka berkembang sebagai hasil dari interaksi ini, dan mereka juga merasa lebih bertanggung jawab terhadap komunitas. Pemilih muda lebih cenderung berpartisipasi dalam politik dan bersemangat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ketika mereka merasa memiliki terhadap komunitasnya (Nisya Fadillah, 2024).

Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Karakteristik, latar belakang, pengalaman, dan hambatan generasi pemilih baru berbeda dengan generasi pemilih sebelumnya. Siswa menyediakan sebagian besar dari mereka. Seperti yang kita ketahui, pelajar saat ini sudah lebih kekinian dan selalu mengikuti tren yang sedang berkembang, seperti media sosial yang sudah tidak asing lagi. Dengan para pemula yang terpicu oleh teknologi mutakhir ini dan mampu memanfaatkannya dengan mudah. Mereka juga sangat menerima ide-ide baru. Oleh karena itu, para pemilih baru ini sangat berkuasa, khususnya di media sosial.

Kurangnya partisipasi pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan umum juga dapat disebabkan karena mereka baru mencapai usia pilih, belum mempunyai pengaruh politik yang luas, keadaannya yang masih genting, dan mudah terpengaruh oleh orang lain sehingga menyebabkan pilihan mereka menyimpang dari harapan mereka. Selain itu, pemilih yang tidak berpengalaman kurang memiliki kesadaran politik dan oleh karena itu sangat rentan terhadap pendekatan materialistis. Bahkan ada pemilih yang tidak berpengalaman yang menganggap bahwa memilih tidak ada gunanya dan tidak ada hubungannya dengan mereka.

Pada era digital, permasalahan terjadi ketika media sosial mempolarisasi opini, memanipulasi, dan menyebarkan informasi palsu. Platform ini memudahkan kampanye fitnah yang meremehkan kepribadian kandidat untuk berkembang biak dan mempengaruhi opini publik dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Meskipun algoritme platform ini memaparkan pengguna pada sudut pandang serupa dan memperburuk polarisasi, hal ini dapat merusak reputasi kandidat dan mempengaruhi keputusan pemilih tanpa dasar yang kuat. Meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula di media sosial menghadirkan banyak kendala bagi para kandidat. Kandidat menghasilkan konten yang menarik dan imajinatif

untuk menarik minat pemilih pemula dan membujuk mereka untuk memberikan suara (Dewi Putri Sitompul, Yulita Sitorus, Eugenia Gracia Br Sibuea, 2024).

Kesulitan lainnya juga terjadi ketika informasi tidak terkontrol atau lebih provokatif dan emosional dibandingkan mendidik. Pemilih muda harus berhati-hati saat menggunakan media sosial karena ada algoritma di sana yang tidak bisa di sadari. Misalnya platform media sosial TikTok, jika kita sedang mencari informasi pemilu 2024 dan muncul pasangan calon presiden pertama nomor urut dua, maka akan selalu menampilkan nomor pasangan calon presiden di setiap Halaman Utama TikTok (fyp). Dimana mereka juga tidak mengetahui apakah informasi tersebut benar atau hanya hoax, dan terkadang video informasi tersebut hanya menampilkan sebagian saja atau hanya ditayangkan sesekali saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah variabel seperti derajat pendidikan politik, ketersediaan informasi, dan keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum di Jakarta Selatan tahun 2024. Padahal pemilih pemula bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu di Jakarta Selatan tahun 2024. Meskipun dampaknya besar, masih ada hambatan yang harus diatasi, seperti ketidaktahuan mereka terhadap proses pemilu dan kurangnya kampanye yang ditujukan kepada mereka. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilih pemula mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi, kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, sangatlah penting.

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan betapa pentingnya menggunakan media sosial sebagai alat untuk terhubung dengan pemilih muda. Informasi terkait pemilu dapat disebarkan secara lebih efisien dan menarik dengan memanfaatkan platform digital yang sudah biasa digunakan oleh generasi ini. Mengembangkan kampanye media sosial yang inovatif dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan pemilih pemula dan memotivasi mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses politik. Secara umum, meningkatkan partisipasi pemilih pertama di Jakarta Selatan pada pemilu 2024 memerlukan upaya terkoordinasi untuk meningkatkan pendidikan politik dan ketersediaan informasi.

Saran

Disarankan agar berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat sipil, berkolaborasi untuk menciptakan dan melaksanakan inisiatif yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik pemilih muda berdasarkan temuan penelitian tentang jumlah pemilih pemula di pemilu. Pemilihan Umum Jakarta Selatan tahun 2024. Menciptakan kampanye pendidikan pemilih yang ditujukan untuk perguruan tinggi dan universitas dengan pendekatan yang menarik dan interaktif termasuk seminar, lokakarya, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas adalah salah satu langkah yang diperhitungkan dan dapat dilakukan. Selain itu, informasi tentang proses pemilu, hak-hak pemilih, dan bagaimana partisipasi mereka akan mempengaruhi masa depan politik negara harus mudah diakses. Untuk membuat pemilih pemula merasa lebih dilibatkan dan diberdayakan dalam proses demokrasi, keterlibatan masyarakat lokal juga perlu ditingkatkan melalui inisiatif yang melibatkan mereka dalam debat publik dan simulasi pemilu. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, jumlah pemilih pemula di Jakarta Selatan akan meningkat secara signifikan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan publik dan masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Hasyim, Sharla Shafa Salsabila Azkia. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 187–200.
- Akbar Bhayu Tamtomo & Kristian Erdianto. (25 Juli 2023). Kompas.com. INFOGRAFIK: Milenial Dominasi Pemilih Pemilu 2024, Capai 68,8 Juta. Diakses melalui [INFOGRAFIK: Milenial Dominasi Pemilih Pemilu 2024, Capai 68,8 Juta](#) pada 10 November 2024.
- Ahmad Zairudin, Abdurrahma, Muhammad Irfan Faqih. "URGensi PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA." *Communnity Development Journal* 3, no. 3 (2022): 1809–15.
- Awaliah, Aida Fitriana, Fitri Rahmawati, and Robby Firliandoko Fadilah, Jawi Lisda Nafis, Muhammad Judatama, Syahbani, Muhammad Rafli Fitriah, Nenden Solihin, Sadam Syifa Kartini. "Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif." *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1087–92.
- Beniman, Mursin, Ikbar, Chairan Zibar L Parisu. "PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2024." *Jurnal Sultra Elementary School* 3, no. 2 (2022): 70–83.
- Dewi Putri Sitompul, Yulita Sitorus, Eugenia Gracia Br Sibuea, S. D. E. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH PEMULA. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 767–775.
- Elen Pitria, Della Utari, Yesi Marseta, Moneka Tiara Sari, Rizky Ayomi Pangestu. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 3, no. 3 (2023): 210–18.
- Heru Dian Setiawan, TB. Massa Djafar. "PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI PEMILU 2024." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 201–13.
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. "METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA." *Jurnal Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 974–80.
- Muturizal Sah Fenta Hashfi. (2024). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Sosialisasi Pemilu Kepada Generasi Milenial Dan Gen Z Di Jakarta Selatan. *Retorika: Jurnal Komunikasi*, 1(4), 225–235.
- Nina Novita. (2019). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU MEMILIH PEMILIH PEMULA KOTA PADANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 1(2), 128–137.
- Nisya Fadillah. (2024). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Studi Tentang Bentuk Partisipasi dan Preferensi Politik Pelajar SMAN 60 Jakarta Selatan*. Universitas Nasional.
- Panji Surianto. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KARO TAHUN 2015*. Universitas Sumatera Utara.
- Pickard, S. (2019). *Engaging young people in politics: A guide for practitioners*. Palgrave Macmillan.

- Smith, D. J., & Michael, J. (Eds.). (2009). *Youth and political participation: A global perspective*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Sukarman Kamuli, Sainudin Latore, Y. S. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158–3170.
- Sunarso. “Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya).” *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 10, no. 1 (2010).
- Taufiqurrohman Syahuri, Syamsul Hadi, G. A. Z. (2023). PENINGKATAN KESADARAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PELAJAR SMAN 34 JAKARTA PADA PEMILU SERENTAK 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khaulistiwa*, 6(2), 117–124.
- Yalvema Miaz. *PARTISIPASI POLITIK: Pola Perilaku Pemilih Pemula Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP Press Padang, 2012.